

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku

- Arto, Mukti, 2007, *Praktek Perkara Perdata Pada Peradilan Agama*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta.
- Dewata, Mukti Fajar Nur dan Yulianto Achmad, 2006, *Dualisme Penelitian Hukum*, Fakultas Hukum UMY, Yogyakarta.
- Gultom, Elfrida, 2017, *Hukum Acara Perdata Edisi 2*, Media wacana Media, Jakarta.
- Harahap, Krisna, 2008, *Hukum Acara Perdata: Mediasi, Class Action, Arbitrase & Alternatif*, Grafiti, Bandung.
- Harahap, M Yahya, 2017, *Hukum Acara Perdata*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Ilyas, Amir, 2016, *Kumpulan Asas-Asas Hukum*, Rajawali, Jakarta.
- Kansil, C.S.T., 1996, *Pokok-Pokok Etika Profesi Hukum*, Pradnya Pramita, Jakarta.
- Manan, Abdul, 2012, *Penerapan Hukum Acara Perdata di Peradilan Agama*, Kencana, Jakarta.
- Mertokusumo, Sudikno, 2017, *Hukum Acara Perdata*, Cahaya Atma Pustaka, Yogyakarta.
- Muhammad Abdulkadir, 2015, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Mulyadi, Lilik, 1999, *Hukum Acara Perdata Menurut Teori dan Praktik Peradilan Indonesia*, Djambatan, Jakarta.
- Rasaid, M Nur, 1996, *Hukum Acara Perdata*, Sinar Grafika Jakarta.
- Soekanto Soejono, 1984, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta.
- Soekanto, Soerjono, 1986, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Rajawali, Jakarta.
- Soekanto, Soerjono dan Sri Mammudji, 2003, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, PT. Raja Grafindo Perada, Jakarta.
- Soemitro, Ronny Hanitijo, 1983, *Metodelogi Penelitian Hukum*, Ghalia Indonesia, Jakarta.
- Soeparmono, R, 2015, *Hukum Acara Perdata dan Yurisprudensi*, Mandar Maju, Bandung.

- Subekti, 1987, *Hukum Pembuktian*, Pradnya Paramita, Jakarta.
- Subekti, R., Tjirosudibyo, R., *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, Pradnya Paramita, Jakarta.
- Sulastriyono, 2014, *Metode Penelitian dan Penulisan Hukum-Program Sarjana Mata Kuliah Wajib*, Bahan Kuliah, Rencana Program Kegiatan dan Pembelajaran Semester dan Bahan Ajar, Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta.
- Sutantion, Retno Wulan, et, al., 1997, *Hukum Acara Perdata Dalam Teori dan Praktek*, CV Mandar Maju, Bandung.
- Syahrani, Riduan, 2013, *Materi Dasar Hukum Acara Perdata*, Citra Aditya Bakti, Bandung.

## **B. Artikel Jurnal**

- Arkisman, 2016, Alat Bukti Pemeriksaan Setempat Pada Sidang Perkara Perdata Di Pengadilan Negeri Gresik, *Jurnal Pro Hukum*, Gresik.
- Atiqah, Dewi, Peranan Hakim dalam Mewujudkan Asas Keadilan, Kepastian Hukum dan Kemanfaatan Putusan, *Artikel Pengadilan Agama Purwodadi*, Purwodadi.
- MA II, Rangkuman Yurisprudensi (RY), 1979, Hukum Perdata dan Acara Perdata, *Proyek Yurisprudensi MA*, Mahkamah Agung.
- Mahardika, Ida Bagus Praystha, et. al., 2018, Peran Pemeriksaan Setempat (Descente) dalam Pembuktian Perkara Perdata bagi Hakim Pengadilan Negeri Singaraja Kelas IB, *Artikel*, Komunitas Yustisia Universitas Pendidikan Ganesha.
- Rosalina, Maria, 2018, Implementasi Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2001 tentang Pemeriksaan Setempat dalam Menyelesaikan Sengketa Tanah Pada Pengadilan Negeri Stabat, *Jurnal Hukum*, Universitas Islam Sumatera Utara.

## **C. Hasil Penelitian/Tugas Akhir**

- Sari, Febriana Indah, 2017, Tinjauan tentang Kekuatan Pembuktian Pemeriksaan Setempat dalam Pemeriksaan Sengketa Perdata (Sengketa Tanah) di Pengadilan Negeri Surakarta, *Hasil Penelitian*, Politeknik Negeri Madiun, Madiun.
- Wibowo, Sigit, 2018, Peranan Alat Bukti Pemeriksaan Setempat (Gerechtieljke Plaatsopneming) dalam Sistem Pembuktian Pidana (Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri Semarang Nomor: 192/Pid.B/2016/Pn Smg. Atas

Nama Terdakwa Sodri Wasingan, *Skripsi*, Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta.

Wijayanta, Tata, *et. al*, 2009, Penerapan Prinsip Hakim Pasif dan Aktif Serta Relevansinya Terhadap Konsep Kebenaran Formal, *Laporan Penelitian*, Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta.

#### D. Peraturan Perundang-Undangan

*Herzien Inlandsch Reglement* (HIR) dimuat dalam Lembaran Negara Nomor 16 Jo. 57/1848 tentang *Reglement op de uit oefening van de politie, de Burgelijke rechthepleging en de Strafvordering onder de Inlanders en de Vremde Oosterlingen op Java en Madura* (Reglemen tentang melakukan tugas kepolisian mengadili perkara perdata dan penuntutan perkara pidana terhadap golongan Bumiputera dan Timur Asing di Jawa dan Madura).

*Rechtreglement voor de Buitengewesten* (RBg) dalam Lembaran negara Nomor 227 Tahun 1927 tentang hukum acara yang berlaku di persidangan perkara perdata maupun pidana di pengadilan di luar Jawa dan Madura.

Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2001 tentang Pemeriksaan Setempat.

Undang-Undang Republik Indonesia No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Tambahan Lembaran negara Republik Indonesia Nomor 5076).

Undang-Undang Republik Indonesia No. 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5952).

#### E. Website

Basith, Abdil Baril, “Pemeriksaan Setempat Sebagai Pengetahuan Hakim”, [http://www.pa-talu.go.id/front.php?page=artikel&id\\_artikel=3/](http://www.pa-talu.go.id/front.php?page=artikel&id_artikel=3/), diakses pada 12 Februari 2020.

Hasanudin, “Pertimbangan Hukum Hakim dalam Putusan Perkara Perdata dengan Menggunakan Terjemahan *Burgerlijk Wetboek*”, <https://pn-tilamuta.go.id/2016/07/12/pertimbangan-hukum-hakim-dalam-putusan-perkara-perdata-dengan-menggunakan-terjemahan-burgerlijk-wetboek/>, diakses 02 Januari 2020.